



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs.AC Erlambang**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Batam  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agus Setiawan,ST**  
Jabatan : Ketua KPU Kota Batam  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


**Batam, Januari 2016**

**PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU KOTA BATAM,**



Agus Setiawan,ST

**PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA BATAM,**



Drs.AC Erlambang  
NIP. 19640606 199003 1 011

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT KPU KOTA BATAM  
TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Batam	70%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Batam	75%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
		Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	90%
2	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	80%
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	85%
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	80%
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	80%
3	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase Layanan Operasional dan Pelayanan TI	75%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	70%
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%
4	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia	90%
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	90%
	Dokumen kepegawaian	Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	90%
		Terlaksananya penataan SDM	90%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Lingga	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Lingga ke dalam aplikasi SIMAK	75%

	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Melaporkan jumlah persediaan asset berdasarkan stock opname	1 Laporan
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	100%
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentasi jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%
6	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
	Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	60%
7	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	80%
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase peningkatan kualitas advokasi dan bantuan hukum	70%
		Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	80%
8	Meningkatnya kualitas dukungan teknis Pemilu dan Pemilukada	Mengikuti bimtek Pemilukada	100%
		Persentase proses PAW anggota DPR dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1
		Jumlah data serta dokumen Pemilu dan Pemilukada	100
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1

Batam, Januari 2016


  
**KPU Kota Batam**  
**SEKRETARIS**  
  
**Drs. AC. Erlambang**  
**NIP. 196406061990031011**

